

**PENGARUH *POLITICAL CONNECTION* PADA DEWAN
KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE TAHUN 2010-2014**

Laela Wulandari

Jurusan Manajemen/Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Laelawulandari91@gmail.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *political connection* pada dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 61 observasi. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi di antara variabel independen (*political connection* pada dewan komisaris dan *political connection* pada dewan direksi) terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *Return On Assets*. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengukuran *political connection* adalah *size* dan *leverage*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa *political connection* pada dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. *Political Connection* pada dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Untuk variabel kontrol, hanya *size* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sementara *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014.

Kata kunci: *Financial Performance, Political Connection, Size, Leverage*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect political connection of the board of commissioners and political connection of the board of directors on the finance performance mining industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014. Number of observations in this study was 61 observations. In order to know the relationship occur among the independent variable (political connection of the board of commissioners and political connection of the board of director) on financial performance with measured used the Return On Assets using the multiple linear regression analysis model, F-test and t-test was conducted. The control variabels that were used in this study for the measurement of financial performance are size and leverage.

This study uses a quantitative approach with multiple linear regression analysis model. This study shows that political connection of the board of commissioners was negative significant on the use of financial performance, political connection of the board of directors was insignificant on the use of financial performance. For the control variables, size is significantly positive effect on the use of financial performance, leverage is insignificantly on the use of financial performance in mining industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014.

Keywords : Financial Perfomance, Political Connection, Size, Leverage

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu fasilitator dalam suatu negara dikarenakan pasar modal mampu memenuhi kebutuhan akan permintaan dan penawaran modal bagi kalangan industri dan keseluruhan entitas. Selain itu, pasar modal juga digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu alat dalam mengendalikan perekonomian negara. Perkembangan pasar modal selain menambah sumber-sumber pengerahan dana masyarakat di luar perbankan, pasar modal juga merupakan sumber dana yang potensial bagi perusahaan yang membutuhkan dana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dengan seiring perkembangan industri yang pesat, maka kebutuhan atas informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang banyak digunakan adalah informasi akuntansi, terutama berasal dari laporan keuangan. Keberadaan pasar modal di Indonesia telah menjadi perhatian yang besar dalam suatu bisnis. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam berinvestasi yang semakin meningkat khususnya pada perusahaan sektor pertambangan. Menurut Faccio (2009) dalam Suhartono dan Sany (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *political connection* akan mempunyai pangsa pasar yang besar. Menurut Agrawal dan Knoeber (1997) dalam Suhartono dan Sany (2015) perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih dapat menikmati pendapatan lebih tinggi dan produktivitas lebih besar karena politik merupakan unsur ekonomi yang paling penting terutama dalam hal *profitability* perusahaan. Menurut Faccio (2007), jika perusahaan memiliki *political connection* maka perusahaan dapat memuaskan *shareholder* sehingga dapat mempengaruhi tingkar pasar saham perusahaan. Pada penelitian Faccio (2006) telah membuktikan bahwa terdapat 47 negara yang memiliki perusahaan *political connection* dan memperoleh banyak manfaat diantaranya *leverage* yang tinggi, membayar pajak rendah, *market power* yang tinggi, *market share* yang tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki *political connection*. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang terdapat *political connection*

menjadi lebih kuat bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdapat *political connection*. Dalam kondisi lingkungan politik yang korup ditemukan adanya peningkatan perusahaan yang terkoneksi secara politik dalam memanfaatkan kepentingan atau sumberdaya milik publik menjadi sumberdaya perusahaan. Hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk bisa memenangkan persaingan dalam bisnis (Ang, 2013).

Political Connection memberikan dampak positif pada perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi pada tingkat birokrasi, lemah dalam perlindungan hak cipta, intervensi penguasa yang kuat dan pemerintahan yang tidak demokratis (Faccio, 2006). Leuz dan Gee (2006) menjelaskan bahwa penyusunan strategi perusahaan dalam bersaing harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik. Faccio (2006) menjelaskan bahwa untuk memperoleh kinerja *financial* yang baik maka perusahaan melakukan *political connection* dikarenakan politik merupakan salah satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara. Menurut Hill (2009) dalam Suhartono dan Sany (2015) mengemukakan bahwa *political connection* berarti hubungan politik tersembunyi antara manajemen senior dan pejabat pemerintah. Faccio (2006) menjelaskan bahwa dorongan perusahaan untuk memiliki koneksi politik telah mendapat perhatian khusus dari para pengamat ekonomi dikarenakan adanya indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah, terutama bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang mempunyai posisi penting di pemerintahan. Perusahaan terkoneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama (orang yang mempunyai kurang lebih 10% dari total hak suara) atau salah satu pemimpin (Presiden, Wakil Presiden, CEO, *Chairman*, atau sekretaris) yang merupakan menteri, anggota parlemen, berkorelasi dengan politikus atau partai politik (Faccio, 2006). Kim dan Zhang (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memperoleh akses pinjaman modal dengan mudah, resiko yang rendah saat pemeriksaan pajak. Hal ini membuat perusahaan menjadi fokus untuk memperoleh profit perusahaan

melalui *corporate transparency*. Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan, perusahaan mudah memperoleh dana talangan dari pemerintah (*bailout*). Selain itu, *political connection* juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian timbul ketika politikus menggunakan pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan untuk kepentingan politik. Hal ini telah melanggar penerapan *Good Corporate Governance* dan menimbulkan praktek *agency theory*. Chaney *et al.* (2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kualitas kinerja secara akuntansi lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Sebagai contoh di Negara Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan yang termasuk klasifikasi terkait *political connection* masuk dalam pusaran korupsi.

Para dewan komisaris BUMN yang merupakan kepercayaan pemerintah tidak mampu menolak intervensi partai politik atau pejabat partai politik untuk melanggar tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu bentuk *political connection* adalah adanya hubungan dewan komisaris atau dewan direksi yang memiliki dan atau merangkap jabatan tersebut sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, pejabat pemerintah, pejabat militer, mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer. Menurut Wulandari (2013) menyatakan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris suatu perusahaan yang terkoneksi secara politik memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini telah menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Namun, penelitian Dicko dan Khemakem (2015) menemukan bahwa *political connection* erat hubungannya secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan akan tetapi penelitian ini juga menunjukkan apabila terdapat faktor-faktor lain penyebab terkoneksi politik diteliti secara individual justru memberikan hasil yang lebih positif dan signifikan.

Keberadaan dewan komisaris sebagai representasi dari pemegang saham minoritas yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktek pelanggaran *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat memunculkan adanya *political connection*. Jika dewan komisaris didominasi oleh dewan komisaris independen, maka *monitoring* yang dilakukan dewan komisaris independen kepada manajer menjadi lebih efektif (Weisbach, 1988). Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan untuk mengurangi praktek *political connection*.

Menurut Ang (2013) dewan komisaris yang terkoneksi secara politik masih memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan meskipun posisi yang dimiliki sebagai dewan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh Dicko dan Khemakem (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pasar modal pada sisi *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 banyak diperbincangkan di kalangan pelaku industri pertambangan, diantaranya mengenai larangan ekspor hasil tambang mentah (*raw material* atau *ore*) ke luar negeri mulai pada bulan Mei 2012. Khususnya bagi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang sedang berada pada tahap eksplorasi atau baru akan melakukan produksi. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 menyebabkan banyaknya perusahaan pertambangan yang berhenti dan menimbulkan keraguan bagi para investor dan calon investor yang mencoba melakukan eksplorasi untuk mencari lahan tambang baru. Hal ini menyebabkan terjadinya PHK di beberapa perusahaan pertambangan dan berkurangnya ekspor tambang Indonesia ke negara-negara importer. Pemilihan sektor industri yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan *political connection* yaitu sektor pertambangan dikarenakan sektor yang *highly regulated environment* (SGP). Selain itu, pemilihan sektor pertambangan berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 juga keberadaan perusahaan pertambangan pada pertengahan tahun 2009 mengalami penurunan kinerja karena akibat dari krisis ekonomi secara

global. Misalkan, perusahaan batubara yang sangat potensial dalam mengeksplor bahan baku ke negara maju. Namun, adanya krisis mengakibatkan perusahaan batubara mengalami penurunan laba dan berdampak pada harga saham sehingga perolehan *return* saham juga menurun di perusahaan pertambangan batubara.

Contoh kasus mengenai perusahaan terkoneksi politik juga telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 23 Agustus 2016 telah menetapkan Inisial NM, Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai tersangka korupsi. Selama periode 2009-2014, NM diduga menerima suap senilai lebih dari Rp 60 miliar terkait dengan pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Buton dan Bombana. Pemberian izin penggunaan lahan, termasuk usaha pertambangan sebagaimana dilakukan NM saat ini kerap menjadi modus kepala daerah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Praktik ini umumnya muncul di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan erat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Setiap menjelang pilkada di wilayah kaya sumber daya alam, muncul kecenderungan peningkatan pemberian izin usaha pertambangan. Izin diberikan kepala daerah kepada pihak investor. Namun, pemberian konsesi kepada investor tambang tersebut tidak gratis, sering kali disertai dengan ada imbal jasa (*kickback*) dalam bentuk suap atau gratifikasi. Untuk setiap izin yang dikeluarkan, nilai imbal jasanya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Menurut artikel *Indonesian Corruption Watch* menyebutkan bahwa negara sering kecolongan akibat kekurangan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Untuk membahas mengenai penerimaan negara, saat ini Divisi *Monitoring* dan Analisis Anggaran ICW berfokus pada penerimaan dari sumber daya alam khususnya sektor pertambangan (industri ekstraktif) serta penerimaan negara dari pajak. Selain itu, fluktuasi harga produk perusahaan sektor pertambangan di pasar Internasional menyebabkan nilai total penjualan perusahaan tersebut ikut berfluktuasi sangat tajam. Nilai penjualan berkorelasi langsung terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA). Untuk penelitian ini, pengukuran terhadap kinerja perusahaan dengan

menggunakan ROA. Sehingga diduga bahwa faktor harga jual lebih berperan dalam menentukan kinerja perusahaan di sektor pertambangan. Artinya, walaupun perusahaan terkoneksi atau tidak terkoneksi secara politik namun jika nilai penjualan turun drastis maka ROA perusahaan akan turun.

Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono dan Sany (2015) menunjukkan bahwa hubungan politik dewan komisaris dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan *asset turnover* perusahaan konstruksi di Indonesia. *Firm size* berpengaruh signifikan terhadap ROE dan *asset turnover* perusahaan konstruksi di Indonesia. *Board size* dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROE perusahaan konstruksi di Indonesia. *Board size* dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROE, *profit margin*, dan *asset turnover* perusahaan konstruksi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dicko dan Khemakem (2014) menunjukkan bahwa *political connection* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, memberikan pandangan bahwa pentingnya keterkaitan antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan dan jika terdapat faktor-faktor koneksi politik diteliti secara rinci serta detail justru akan menemukan hasil yang lebih akurat. Wulandari (2013) menemukan bahwa *political connection* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja perusahaan lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik dimana kinerja perusahaan diukur dengan ROA. Sedangkan hasil penelitian Osamwonyi *et al.* (2013) menemukan bahwa tidak berpengaruh antara komposisi dewan komisaris dengan *political connection* terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Pihak regulator dan badan independen harus merancang tata aturan serta pedoman yang baik bagi politikus yang berkepentingan dan berkedudukan pada suatu perusahaan *go public*. Menozzi *et al.* (2010) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Apabila dewan komisaris dan dewan direksi terlibat dalam *political connection* pada suatu negara, maka

akan terjadi dominasi oleh dewan komisaris dan dewan direksi pada perusahaan *go public* di Negara Italia. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi yang terhubung dengan kegiatan politik memberikan dampak negatif pada kinerja perusahaan. Menurut Faccio (2006) perusahaan yang terhubung secara politik selalu erat kaitannya dengan negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa harga saham meningkat secara signifikan apabila ada salah satu anggota perusahaan memasuki dunia politik khususnya berada dalam kabinet utama kementerian (*prime minister*) daripada sebagai anggota parlemen. Menurut Leuz dan Gee (2003) juga menemukan bahwa hubungan antara *political connection* dan transparansi perusahaan di Indonesia sangat lemah dikarenakan kekuatan politik. Perusahaan yang terkoneksi politik lebih memiliki saham privatisasi secara konsisten. Selain itu, ditemukan bahwa perusahaan yang beroperasi dan mendukung perekonomian di Indonesia dengan menggunakan model *Anglo-Saxon* dengan koneksi politik yang lemah justru akan memberikan perbaikan transparansi dan perbaikan tata kelola perusahaan.

TELAAH PUSTAKA

A. Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik. Masalah konflik agensi dalam perusahaan biasanya terjadi karena *principal* tidak dapat berperan aktif dalam manajemen perusahaan. Pihak *principal* mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para agen untuk bekerja atas nama pemilik dan kepentingan pemilik. Akibatnya, konflik agensi (*agency conflict*) yang sulit diselaraskan dengan teori agensi (*agency theory*). *Agency theory* menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi antara satu atau lebih orang (*principal*) dengan orang lain (*agent*) dalam sebuah kontrak, dimana *agent* diminta untuk mewakili *principal* dalam membuat keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* adalah pemilik saham yang diwakili oleh dewan komisaris sedangkan *agent* adalah manajemen

pengelola perusahaan yang diwakili oleh dewan direksi. Masalah keagenan yang timbul dari perbedaan tujuan antara *agent* yang telah bertindak sesuai dengan keinginan pemilik atau tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Kedua, masalah keagenan yang timbul dari perbedaan sikap antara *agent* dengan *principal* terkait risiko sehingga memungkinkan manajer mengambil tindakan yang berbeda dari yang diinginkan oleh *shareholders* karena adanya perbedaan preferensi risiko. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhard, 1989). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yakni asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian dan asumsi tentang informasi. Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhard, 1989).

Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yakni asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian dan asumsi tentang informasi. Scott (2000) dalam Wiryadi dan Sebrina (2013) mengungkapkan terdapat dua macam asimetri informasi. Pertama, *adverse selection* dimana para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan, informasi dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar dan fakta-fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh investor apabila informasi tersebut disampaikan pada investor. Kedua, *moral hazard* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemilik yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Menurut Meisser, *et al.* (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yakni pertama, terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dimana manajemen secara umum mempunyai lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik. Kedua, terjadinya konflik kepentingan (*conflict interest*) akibat ketidaksamaan tujuan dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Untuk menghindari masalah tersebut akan adanya biaya-biaya yang disebut biaya agensi (*agency cost*).

Biaya agensi dibagi menjadi tiga yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual losses*. Dengan demikian, kemunculan *agency cost* akan menurunkan kinerja perusahaan (Cutchley dan Hansen, 1989). Bahkan, Megginson (1997: 336) menyebut *agency cost* antara manajer dan *shareholders* sebagai nyata, luas, dan sulit untuk dikurangi secara efektif.

B. *Good Corporate Governance (GCG)*

Konsep *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (CGPI 2008). *Corporate governance* merupakan mekanisme yang dapat mengatasi masalah keagenan (Barnhart dan Rosenstein, 1998). Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward, 1990), sehingga dengan mekanisme *corporate governance* yang baik akan menghasilkan kinerja badan usaha yang lebih baik. Walsh dan Seward (1990) dan World Bank (1999) mekanisme pengendalian *corporate governance* dibagi menjadi dua yakni mekanisme pengendalian internal perusahaan dan mekanisme eksternal perusahaan.

Mekanisme internal *corporate governance* merupakan indikator *corporate governance* yang dapat dikendalikan oleh pihak internal perusahaan (Dedu dan Chitan, 2013). Mekanisme internal *corporate governance* merupakan faktor yang dapat memperbaiki pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme eksternal *corporate governance* (Li et al., 2007). Mekanisme internal *corporate governance* meliputi Dewan direksi adalah bagian tertinggi di perusahaan yang tugasnya bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan kegiatan operasi perusahaan (Agyei dan Owusu, 2014). Dewan direksi memiliki peran penting dalam perusahaan karena bertindak

sebagai pengambil keputusan yang akan menentukan masa depan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mendeskripsikan bahwa dewan direksi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi yang berukuran besar dinilai dapat menghambat dominasi sekelompok orang untuk mempengaruhi keputusan, mengatasi konflik pemegang saham dengan manajer sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan akan lebih banyak pengetahuan yang terkumpul dari masing-masing anggota dewan direksi (Danoshana dan Ravivathani, 2014; Oyerinde 2014). Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan direksi akan senantiasa melakukan rapat. Rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimum empat kali dalam setahun. Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik minimum dua kali dalam setahun. Menurut Bouaziz dan Triki (2012), frekuensi rapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat dewan komisaris maka akan semakin tinggi pula pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi. Dengan hal ini maka kinerja keuangan akan meningkat.

C. *Political Connection*

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). *Political connection* adalah jika pemegang saham otoritas atau petinggi perusahaan adalah anggota parlemen, menteri atau kepala negara, terkait dengan pejabat-pejabat negara, lembaga kenegaraan (Faccio, 2006). Perusahaan yang memiliki koneksi politik ialah perusahaan atau konglomerat yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah meliputi perusahaan yang berbentuk BUMN

atau BUMD. Sedangkan konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Gomez dan Jomo, 1997). Chaney *et al.* (2011) menunjukkan bahwa kualitas *accounting information* dari perusahaan yang terkoneksi politik lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi politik dapat menyebabkan melemahnya praktek-praktek manajerial yang baik dan menyebabkan buruknya tata kelola perusahaan. Praktek *political connection* dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu keberadaan orang yang terkait dengan politik dalam jajaran dewan komisaris dan dewan direksi serta kepemilikan saham pemerintah dalam perusahaan. Keberadaan orang-orang yang terkait dengan politik dalam susunan dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan telah menimbulkan banyak penyimpangan antara lain perlakuan istimewa untuk mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah, perpajakan yang lebih ringan, akses untuk mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah, perlindungan melalui regulasi pemerintah dan berbagai bentuk lainnya. Berbagai insentif pada perusahaan-perusahaan tertentu tersebut telah merugikan masyarakat umum, karena *resource* yang dikuasai pemerintah hanya dinikmati perusahaan-perusahaan tertentu (Faccio, 2006). Disisi lain perusahaan yang terkoneksi secara politik harus menanggung biaya untuk perlakuan istimewa dengan adanya *political connection*. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh politisi dalam pengambilan kebijakan perusahaan dapat menimbulkan distorsi insentif, dan misalokasi investasi serta meningkatkan korupsi (Shleifer dan Vishny, 1994 dalam Ang *et al.*, 2010).

Political connection pada dewan komisaris

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Dengan tugas pengawasan dan nasehat kepada dewan direksi, anggota dewan komisaris yang terkoneksi

secara politik dapat mempengaruhi dewan direksi untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan politisi yang terkoneksi politik dan sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kinerja perusahaan. Faccio (2011) menunjukkan bahwa kerugian terhadap perusahaan akan timbul ketika politikus menggunakan pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan untuk kepentingan politiknya sehingga melanggar penerapan GCG dan menimbulkan praktek *agency theory*.

D. Pengaruh *political connection* pada dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan

Teori agensi menyatakan bahwa perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik. Masalah konflik agensi dalam perusahaan biasanya terjadi karena *principal* tidak dapat berperan aktif dalam manajemen perusahaan. Pihak *principal* mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan kepada para agen untuk bekerja atas nama pemilik dan kepentingan pemilik. *The conflict of interest hypothesis* menyatakan bahwa manajemen sering mengambil tindakan atau kebijakan yang non optimal dan mengarah pada kepentingan pribadi, mengakibatkan strategi aliansi antara dewan komisaris dengan manajemen, ditanggapi secara negatif oleh pasar. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan harga saham perusahaan di pasar modal sehingga pemegang saham minoritas menjadi turut dirugikan. Aliansi antara dewan komisaris dan manajemen dapat terjadi di perusahaan baik yang terkoneksi politik maupun yang tidak terkoneksi politik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab dewan direksi dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa apabila dewan komisaris ada yang terlibat pada bidang politik justru akan direspon negatif oleh penurunan harga saham.

$$\text{Dewan Komisaris} = \frac{\text{jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik pada tahun } t \dots \dots \dots (2)}$$

H₁: Dewan Komisaris yang terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan

Political connection pada dewan direksi

Menurut UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan tugas pengurusan perusahaan, anggota dewan direksi yang terkoneksi secara politik dapat melakukan tindakan yang menguntungkan politisi yang terkoneksi. Tindakan itu dapat berupa pilihan investasi yang tidak benar, pengeluaran yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan dan praktek keagenan yang menguntungkan pemilik saham terkait *political connection*. Pound (1998) menyatakan bahwa investor institusional mayoritas memiliki kecenderungan untuk berkompromi atau berpihak kepada manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Pengaruh political connection dalam struktur dewan direksi terhadap kinerja perusahaan

Berdasarkan teori agensi, salah satu tanggung jawab manajemen adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam menjalankan tugas, manajemen menghadapi permasalahan yang kompleks baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. yang menjelaskan mengenai hubungan antara manajemen dengan prinsipal. Seringkali terjadi permasalahan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Namun permasalahan manajemen menjadi lebih rumit ketika aliansi tersebut terjadi di perusahaan yang terkoneksi politik sebab pihak yang terlibat menjadi lebih luas. Oleh karena

itu teori agensi dipandang mampu untuk menjelaskan konflik antara manajemen dan pemegang saham terutama dalam perusahaan yang terkoneksi politik. Dalam hal ini dewan direksi berlaku sebagai pihak manajemen.

Konflik pemegang saham dengan manajer dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Konflik ini dapat diakibatkan keterlibatan direksi dalam dunia politik tentunya akan direspon investor dalam suatu kegiatan politik, maka akan terjadi *conflict of interest* dalam menjalankan operasional perusahaan. Investor akan memiliki perspektif negatif akan kinerja perusahaan apabila direksi memang terlibat dalam kegiatan politik.

$$Dewan\ Direksi = \frac{jumlah\ dewan\ direksi\ yang\ terkoneksi\ politik}{pada\ tahun\ t.....(3)}$$

H₂: Dewan Direksi yang terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam sektor pertambangan dan telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan uji regresi yang memperhatikan nilai *F-statistic*, *T-statistic*, dan R². Untuk memastikan bahwa persamaan regresi telah akurat, tidak terbiaskan, dan konsisten maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

$$ROA = \beta_0 - \beta_1 PC\ Kom - \beta_2 PC\ Dir + \beta_3 Size + e.....(1)$$

$$ROA = \beta_0 - \beta_1 PC\ Kom - \beta_2 PC\ Dir + \beta_3 Size - \beta_4 Lev + e.....(2)$$

Keterangan:

ROA = *Return On Assets*

PC Kom= *Politically connected* dewan komisaris

PC Dir= *Politically connected* dewan direksi

Size = Ukuran Perusahaan

Lev = *Leverage*

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*Return On Assets*) dimana $\text{Net Income} / \text{Total Assets}$.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah koneksi politik dalam struktur dewan komisaris dan koneksi politik dalam struktur dewan direksi.

1. *Political Connection* pada Dewan Komisaris (PC Kom)

Political connection pada dewan komisaris, digunakan sebagai variabel *dummy* dimana variabel ini bernilai 1 jika dewan komisaris terkoneksi secara politik dan bernilai 0 jika tidak ada dewan komisaris yang terkoneksi secara politik. Kriteria adanya *political connection* apabila ada dewan komisaris yang merupakan pejabat negara setingkat presiden, wakil presiden, menteri dan atau setingkat menteri, pejabat militer atau kepolisian, anggota DPR/MPR/DPD, ketua dan ketua umum partai politik, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat. Dalam variabel ini dewan komisaris perusahaan BUMN otomatis akan dianggap terkoneksi secara politik terkait dengan kepemilikan saham pemerintah di perusahaan BUMN tersebut.

Dewan Komisaris = jumlah dewan komisaris yang terkoneksi politik pada tahun t(2)

2. *Political Connection* pada Dewan Direksi (PC Dir)

Political connection di dewan direksi menggunakan variabel *dummy* dimana variabel ini bernilai 1 jika dewan direksi yang terkoneksi secara politik dan bernilai 0 jika tidak ada dewan direksi yang terkoneksi secara politik. Kriteria adanya *political connection* apabila ada dewan direksi yang merupakan pejabat negara setingkat presiden, wakil presiden, menteri dan atau setingkat menteri, pejabat militer atau kepolisian, anggota DPR/MPR/DPD, ketua dan ketua umum partai politik, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat. Dalam variabel ini dewan direksi perusahaan BUMN tidak otomatis dianggap terkoneksi secara

politik. Hal terkait asumsi operasional perusahaan diserahkan pada professional dibidangnya.

Dewan Direksi = jumlah dewan direksi yang terkoneksi politik pada tahun t.....(3)

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini yakni *size* dan *leverage* dimana *size* diperoleh dari Ln (*Total Assets*) dan *Leverage* diperoleh dari *Total Debt/Total Equity*.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji adanya distribusi normal atau tidak pada sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya. Uji statistik non parametrik Kolmogorove-Smirnov (K-S) digunakan untuk menguji normalitas variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2013:110). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2013:110):

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_1 : Data residual tidak berdistribusi normal

Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka data terdistribusi dengan normal.
2. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi apabila terdapat hubungan korelasi yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013:91). Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat tolerance value atau Variance Inflation Factors (VIF). VIF menggunakan hasil analisis yang diperoleh dari penggunaan SPSS. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013: 91):

- a) Multikolinieritas akan terjadi apabila nilai $VIF > 10$ atau tolerance value $< 0,1$.
- b) Multikolonieritas tidak terjadi bila nilai $VIF < 10$ atau tolerance value $> 0,1$.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam sebuah data, dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Jika terdapat pola tertentu pada Grafik Scatterplot SPSS, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Grafik *Plot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Ghozali, 2013: 105).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (Santoso, 2012:241). Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (DW) untuk mendeteksi uji autokorelasi. Namun secara umum bisa diambil patokan (Quadratullah, 2013: 209):

- a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

D. Ada dua jenis uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk melakukan pengambilan keputusan dalam uji f dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel dengan level signifikan sebesar 0,10 ($\alpha = 10\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α yaitu 10%, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika signifikansi lebih kecil dari α yaitu 10% maka hipotesis akan diterima (koefisien regresi signifikan), yang berarti secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis statistik pada uji F adalah sebagai berikut:

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen atau bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen atau terikat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah: 1) Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak); 2) Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi dengan level signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi $>$ dari α yaitu 5% maka hipotesis akan ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individu variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $<$ dari α yaitu 5% maka hipotesis akan diterima (koefisien regresi signifikan), yang berarti secara individu variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis statistik pada uji t sebagai berikut:

Hipotesis 1

H_0 : $\beta_1 \geq 0$; *political connection* dewan komisaris tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

H_1 : $\beta_1 < 0$, *political connection* dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Hipotesis 2

H_0 : $\beta_2 \geq 0$; *political connection* dewan direksi tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

H_1 : $\beta_2 < 0$, *political connection* dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

I. Variabel Kontrol

1. Size

H_0 : $\beta_3 \geq 0$; *size* tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

H_1 : $\beta_3 < 0$, *size* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

2. Leverage

H_0 : $\beta_4 \geq 0$, *leverage* tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

H_1 : $\beta_4 < 0$, *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

J. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Jika nilai koefisien determinasi sama dengan satu berarti garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Hasil Pengujian
Model 1

Variabel Dependen : ROA			
Variabel Independen	B	t-stat Probability	Ekspektasi Hipotesis
	-		
PC Kom	0,044**		
PC Dir	-0,003	0,042	Negatif
<i>Size</i>	0,015**	0,888	Negatif
		0,034	Positif
F	0,058 ^b		
R Square	12,2%		

**Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Persamaan regresi untuk pengujian pada model 1 adalah $ROA = -0,415 - 0,044 PC\ Kom - 0,003PC\ Dir + 0,015Size$. Persamaan regresi menunjukkan kedudukan ROA sebagai variabel dependen (variabel terikat) sedangkan PC Kom dan PC Dir sebagai variabel independen (variabel bebas). *Size* sebagai variabel kontrol.

Tabel 2
Hasil Pengujian
Model 2

Variabel Dependen : ROA			
Variabel Independen	B	t-stat Probability	Ekspektasi Hipotesis
PC Kom	-0,039*	0,079	Negatif
PC Dir	-0,004	0,875	Negatif
<i>Size</i>	0,014*	0,070	Positif
<i>Leverage</i>	-0,001	0,522	Negatif
F	0,098 ^b		
R Square	12,8%		

*Signifikan pada $\alpha = 10\%$

Persamaan regresi untuk pengujian pada model 2 adalah $ROA = -0,372 - 0,039PC\ Kom - 0,004PC\ Dir + 0,014Size - 0,001Leverage$. Persamaan regresi menunjukkan kedudukan ROA sebagai variabel dependen (variabel terikat) sedangkan PC Kom dan PC Dir sebagai variabel independen (variabel bebas). *Leverage* dan *size* sebagai variabel kontrol.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengaruh PC Kom terhadap ROA (kinerja perusahaan) yakni Berdasarkan hasil uji t dalam regresi model 1 diperoleh hasil PC Kom terhadap ROA sebesar 0,042 (signifikan pada level 5%). Sedangkan hasil uji t dalam regresi model 2 diperoleh hasil PC Dir terhadap ROA sebesar 0,072 (signifikan pada level 10%). Artinya variabel PC Kom berpengaruh negatif signifikan sehingga hipotesis 1 diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013), Suhartono dan Sany (2015) dan Menozzi *et al.*(2010) yang menemukan pengaruh negatif dan signifikan dari perusahaan terkoneksi politik terhadap ROA. Hal ini berarti perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik sehingga hipotesis pertama diterima yaitu *political connection* dalam struktur dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan terkoneksi politik mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperoleh kemudahan tersebut sehingga dapat mengurangi hasil akhir dari keuntungan yang diperoleh.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Menozzi *et al.* (2010) yang menemukan bahwa di perusahaan BUMN di Italia yang tergolong memiliki koneksi politik yang tinggi memiliki *less efficient resource allocation* dan lemah dalam pengendalian manajemennya. Perusahaan yang terkoneksi politik pada umumnya hanya berfokus pada pencapaian profit, tidak memandang faktor yang lain. Sedangkan, hasil pengaruh PC Dir terhadap ROA (kinerja perusahaan) yakni berdasarkan hasil uji t dalam regresi model 1 diperoleh hasil PC Dir terhadap ROA sebesar 0,888 (signifikan pada level 5%). Sedangkan hasil uji t dalam regresi model 2 diperoleh hasil PC Dir terhadap ROA sebesar 0,875

(signifikan pada level 10%). Artinya, bahwa PC Dir tidak berpengaruh pada kedua model tersebut. Kesimpulannya bahwa PC Dir tidak berpengaruh pada kedua model tersebut, sehingga hipotesis 2 ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhartono dan Sany (2015) dan Osamwonyi *et al.* (2013). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Osamwonyi *et al.* (2013) bahwa koneksi politik dalam direksi yang terkoneksi dalam *political officials*, dikatakan *political officials* dikarenakan dewan direksi adalah bagian tertinggi di perusahaan yang tugasnya bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan kegiatan operasi perusahaan. Dewan direksi memiliki peran penting dalam perusahaan karena bertindak sebagai pengambil keputusan yang akan menentukan masa depan perusahaan. Apabila terkoneksi secara politik, tentunya bukan menjadi permasalahan bagi perusahaan sektor pertambangan yang telah *well-establish* di Indonesia adalah sebagai sektor penyumbang *profit* terbesar di Indonesia. Selain itu Sektor Pertambangan tidak memiliki persaingan industri yang terlalu tinggi, sehingga walaupun direksi terkoneksi politik, maka tidak akan berdampak pada kinerja perusahaan. Koneksi politik yang dimiliki oleh direksi perusahaan pertambangan, justru akan mempermudah peluang perusahaan dalam memasuki pasar dalam ataupun luar negeri, yang akan berpengaruh pada perolehan keuntungan bagi perusahaan.

Mengenai pembahasan variabel kontrol yakni pengaruh *size* terhadap ROA (kinerja perusahaan) dimana uji t pada model regresi 1, didapatkan hasil *size* terhadap ROA sebesar 0,034 (signifikan pada level 5%). Sedangkan pada model regresi 2 didapatkan signifikansinya adalah 0,070 (signifikan pada level 10%). Variabel *size* berpengaruh positif signifikan pada *return on assets* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Ukuran perusahaan berkaitan dengan kinerja perusahaan, semakin besar ukuran tersebut, maka diharapkan kinerja perusahaan akan meningkat. Artinya semakin bertambahnya ukuran perusahaan, maka kenaikan kinerja perusahaan yang berukuran besar relatif lebih tinggi untuk mengeluarkan biaya investasi terhadap penambahan total aktiva, apabila profitabilitas

meningkat, tetapi pada titik atau jumlah tertentu ukuran perusahaan akhirnya akan menurunkan laba (profit) perusahaan. Teori *critical* menekankan pada pengendalian oleh pemilik perusahaan terhadap sumber daya perusahaan seperti aset, teknologi, kekayaan intelektual sebagai faktor-faktor yang menentukan ukuran perusahaan, dimana sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki investasi besar di dalam pengembangan aset operasionalnya. Sebuah perusahaan yang ukuran / skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan politik tidak tercantum di *annual report*. Hasil penelitian ini konsisten dengan Wulandari (2013) dan Dicko dan Khemakem (2014) serta Suhartono dan Sany (2015). Pengaruh *leverage* terhadap ROA (kinerja perusahaan). Pada model regresi 2, diperoleh hasil *leverage* terhadap ROA sebesar 0,522. Variabel *leverage* tidak berpengaruh pada *return on assets* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Kebijakan pendanaan yang tercermin dalam *Debt Equity Ratio* (DER) sangat mempengaruhi pencapaian laba perusahaan. Jika biaya hutang yang tertera dalam laporan keuangan lebih besar daripada biaya modal perusahaan, maka rata-rata biaya modal akan semakin besar dan pencapaian ROA akan semakin kecil. Rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dikarenakan pada sampel perusahaan sektor pertambangan ini ada perusahaan yang mengalami defisiensi modal seperti BUMI tahun 2013 dan 2014. Rasio *leverage* pada sektor pertambangan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain, dikarenakan sektor pertambangan membutuhkan biaya yang lebih tinggi, dan *leverage* bukan merupakan satu-satunya penentu peningkatan atau penurunan ROA. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Dicko dan Khemakem (2015) dan Wulandari (2013) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Koefisien determinasi dalam persamaan regresi model 1 adalah sebesar 0,122. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu PC Kom, PC Dir dapat menjelaskan perubahan variabel dependen yaitu ROA sebesar 12,2%. Sedangkan sisanya yaitu 87,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain

variabel PC Kom dan PC Dir. Koefisien determinasi dalam persamaan regresi model 2 adalah sebesar 0,128 dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu PC Kom, PC Dir dapat menjelaskan perubahan variabel dependen yaitu ROA sebesar 12,8%. Sedangkan sisanya yaitu 87,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain variabel PC Kom dan PC Dir. Dari hasil pengujian hipotesis pada persamaan regresi model 1, dapat terlihat bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA adalah PC Kom dan *size*. Sedangkan PC Dir tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan hasil pengujian hipotesis pada persamaan regresi model 2, dapat terlihat bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA adalah PC Kom dan *size*. Sedangkan PC Dir dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uji F dari hasil pengujian pada regresi model 1 dan regresi model 2 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2010-2014 yang diukur dengan ROA. Berdasarkan uji t dari hasil pengujian hipotesis dengan tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 5\%$) pada model 1 dan tingkat signifikan sebesar 10% ($\alpha = 10\%$) pada model 2 bahwa PC Kom mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Sedangkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t pada regresi model 1 dan regresi model 2 diperoleh hasil bahwa variabel PC Dir tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi investor dan kreditur untuk mempertimbangkan *political connection* pada dewan komisaris dan dewan direksi terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Bagi kreditur, perusahaan yang didalam dewan komisaris dan dewan direksi tidak terkoneksi politik akan menunjukkan ROA yang tinggi dikarenakan kondisi manajemen perusahaan yang sehat dan kompeten. Bagi investor, sebaiknya melakukan investasi pada perusahaan yang didalamnya terdapat dewan komisaris dan dewan direksi dengan *political connection* yang rendah agar

memperoleh kinerja perusahaan yang bagus sehingga akan memberikan hasil pada investasi yang dilakukan.

1. Bagi perusahaan

Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan kinerja perusahaan yang baik tanpa mengutamakan dan mengendalikan koneksi politik dengan cara mempertahankan kondisi manajemen perusahaan secara profesional dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan sehingga tidak memiliki risiko yang lebih tinggi. Selain itu keterbukaan dan kemudahan akses publik terhadap informasi tokoh dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan dapat membantu mengurangi reaksi irasional dari berita yang terkait dengan dugaan praktek politik negatif, yang akan berdampak pada operasional perusahaan.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Keterbatasan penelitian tersebut adalah penggunaan sampel yang hanya berasal dari Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan periode yang lebih panjang untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana koefisien determinasi masih relative rendah. Hal ini dapat terjadi karena masih ada variabel lain yang berpengaruh signifikan namun tidak disertakan dalam penelitian ini sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain kinerja perusahaan hanya diukur dari rasio ROA di mana rasio ROA cenderung berfokus pada tujuan jangka pendek bukan jangka panjang, selain itu penelitian ini hanya melihat *political connection* dari hubungan langsung dengan cara mengidentifikasi susunan dewan direksi dan dewan komisaris tanpa melibatkan sampel perusahaan yang memiliki *political connection* dari hubungan tidak langsung seperti hubungan pertemanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amore, M. D., Bennedsen, M., 2013, *The Value of local political connections in a low corruption environment*, Journal of Financial Economis, Vol. 110, pp. 387-402.
- Arifin, Zaenal, 2005, Teori Keuangan dan Pasar Modal, Edisi Pertama, Ekonimia, Yogyakarta.
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati, 2009, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Surabaya, Airlangga University Press.
- Barnhart, Scott W. dan Stuart Rosenstein, 1998, *Board Composition, managerial ownership, and firm performance: An empirical analysis*, The Financial Review, Vol. 33, pp. 1-16.
- Bouaziz, Zied dan Modamed Triki, 2012, *The Impact of The Board of Directors on the Financial Performance of Tunisian Companies*, Universal Journal of Marketing and Business Research, Vol. 1, No. 2, p. 56-71.
- Brealey, Myers, dan Marcus, 2008, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, Erlangga, Jakarta.
- Brigham, Eugene F. dan Ehrhardt, Michael C, 2005, *Financial Management: Theory and Practice*, 11th edition, Thomson South-Western.
- Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F., 2001, Manajemen Keuangan, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga.
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 11, Penerjemah Ali Akbar Yulianto, Salemba Empat, Jakarta.
- Chaney, P., et. al., 2011, *The Quality of Accounting Information In Politically Connected Firms*, Journal of Accounting and Economics, Vol.51, No. 1-2, p. 58-76.
- Choi, Myung Sub, 2014, *The Value of Political Connections: Evidence from Korean Chaebols*, Bachelor of Business in Finance, Queensland University of Technology.
- Curtchley, C.E dan R. Hansen, 1989, *A test of Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage, Corporate Dividends*, Financial Management, Vo. 18, pp. 35-57.

- Danoshana, S. Dan T. Ravivathani, 2014, *Impact of Corporate Governance on Firm Performance: A Study on Financial Institutions in Sri Lanka*, International Journal of Technological Exploration and Learning (IJTEL), Vo. 3, No.1.
- Dedu, Diane K. Dan John J. Mc.Connel, 2003, *International Corporate Governance*, European Corporate Governance Institute Finance, Working Paper No. 05.
- Dicko, Saidatou dan Hanen Khemakhem, 2015, *S&P/TSX 300 Companies' Political Connections, Compliance with Board of Directors Regulations and Financial Performance*, International Journal of Business and Management, Vol. 10, No. 1, ISSN: 1833-3850.
- Ding, Shujun, et. al., 2014, *Executive Political Connections and Firm performance : Comparative evidence from privately controlled and state owned enterprises*, Vo. 36, pp. 153-167.
- Eisendhardt, Kathleem. M., 1989, *Agency Theory: An Assessment and Review*, Academy of Management Review, Vol. 14: p. 57-74.
- Faccio, Mara, 2006, *Politically Connected Firms*, Journal American Economic Assosiation, Vol. 96, No. 1, pp: 369-386.
- Faccio, Mara, 2007, *The Characteristic of Politically Connected Firms*, Purdue CIBER Working Papers, Paper 51, Electronic copy available at: <http://docs/lib.purdue.edu/ciberwp/51>.
- Fama, E.F., dan Jensen, M.C., 1983, *Agency Problem and Residual Claims*, Journal of Law and Economics, Vol. 26, p. 327-349.
- Fan, Joseph. P. H., T. J. Wong dan Tianyu Zhang, 2014, *Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post IPO Performance of China'S Newly Partially Privatized Firms*, Journal of Applied Finance, Vol. 26, No. 3.
- Gitman, Lawrence J, dan Zutter Chad J, 2012, *Principles of Managerial Finance*, 13th edition, England: Pearson Education Limited.
- Ghozali, Imam., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hatch, E., dan Farhady H., 1981, *Research Design & Statistics for Applied Linguistics*, Rahnama Publications, Tehran.

- Jensen, Michael C, dan William H Meckling, 1976, *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No.4, pp. 305-360.
- Jogiyanto, 2007, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi kelima, BPFE, Yogyakarta, pp 143.
- KNKG, 2006, *Pedoman Umum Good Public Governance*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Leuz, Christian dan Felix Oberholzer Gee, 2003, *Political Relationship, Global Financing and Corporate Transparency*, Working Paper.
- Li, Antai and Xinping Xia, 2013, *Political Connections, Financial Crisis and Firm's Value: Evidence From Chinese Listed Firms*, *International Journal of Business and Management*, Vol. 8, No. 18, ISSN 1833-3850.
- Magginson, W.L., 1997., *Corporate Finance Theory*, Addison-Wesley, Reading, M.A.
- Menozzi, Anna, Maria Gutierrez Urtiaga, dan Davide Vannoni, 2010, *Board Composition, Political Connection and Perfomance in State-Owned Enterprises*, Working Paper, Electronic copy available at: www.carloalberto.org/working_papers.
- Samsul, Mohammad, 2006, *Pasar Modal dan Manajemen Portfolio*, Erlangga, Jakarta.
- Murhadi, Werner Ria, 2013, *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*, Salemba Empat, Jakarta.
- Oyerine, Adewale Atanda, 2014, *Corporate Governance and Bank Perfomance in Nigeria: Futher Evidence from Nigeria*, *International Journal of Business and Management*, Vol. 9, No. 8.
- Purwoto, Lukas, 2011, *Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah, dan Keburaman Laporan Keuangan Terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham*, Ringkasan Disertasi pada Ujian Terbuka, Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen UGM Yogyakarta.
- Osamwonyi, 2013, *Firm Perfomance and Board Political Connection: Evidence from Nigeria*, *European Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 26, ISSN 2222-1905.
- Qudratallah, Mohammad Farhan, 2013, *Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: ANDI.

Sjahrial, Dermawan. 2007, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sucipto, 2003, *Penilaian Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sundjaja, Ridwan S. dan Barlian, Inge. 2003. *Manajemen Keuangan Buku II*. Edisi Keempat. Bandung: Literata Lintas Media.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suhartono, Patrick A. dan Sany, 2015, *Pengaruh Political Connection Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Return On Equity dan Asset Turnover Perusahaan di Sektor Konstruksi*, Journal of Business Accounting Review, Vol. 3, No. 2, pp.261-270.

Walsh, James P., and James P. Seward, 1990, *On The Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms*, Academy of Management Review, Vo. 15, pp. 421-458.

Wulandari, Tri, 2013, *Analisis Pengaruh Political Connection dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan*, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-12.

Wiryadi, Arri dan Nurzi Sebrina, 2013, *Pengaruh Asimetri Informasi, Kualitas Audit, dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba*, Journal of Finance, Vol. 1, No. 2. P. 155-180.

<http://www.antikorupsi.org/id/icw> diunduh pada tanggal 12 Juli 2016 Pukul 19.30 WIB

www.kompasiana.com diunduh pada tanggal 14 Juli 2016 Pukul 21.00 WIB

www.idx.co.id diunduh pada tanggal 15 Juli 2016 Pukul 10.00 WIB

www.online-pajak.com/id/kurs-pajak-dan-kurs-tengah-bi diunduh pada tanggal 20 Juli 2016 Pukul 18.00 WIB.

www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2005/ppgb_2005_azhar_maksum diunduh pada tanggal 25 Juli 2016 Pukul 20.00 WIB